

ABSTRAK

Perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan laki-laki, karena perempuan memiliki kondisi fisik dan sistem budaya patriarki yang meletakkan perempuan sebagai warga kelas dua atau bahkan sebagai objek seksual. Guna mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia, terdapat Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2016, mengamanatkan untuk dibentuknya perangkat daerah seperti dinas daerah, terkhususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, serta kendala-kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam memberikan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Semarang.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis untuk menggambarkan suatu permasalahan pada saat tertentu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara bebas terpimpin sebagai penunjang. Kemudian, metode analisis data yang digunakan ialah data kualitatif yang berupa kata-kata verbal.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang melaksanakan lima layanan untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Lima layanan tersebut meliputi layanan pengaduan, fasilitasi visum, pendampingan bantuan hukum, rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial. Dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa kendala-kendala pada tiap-tiap layanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang melaksanakan lima layanan sebagai bentuk dari perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No. 101 Tahun 2021, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Diperlukannya solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam memberikan bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang; Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan; Pemerintahan Daerah.

ABSTRACT

Women are more likely to be victims of sexual violence than men, because women have physical conditions and a patriarchal cultural system that places women as second-class citizens or even as sexual objects. In order to realize the fulfillment of human rights, with the issuance of Semarang City Regional Regulation Number 14 of 2016, it mandates the establishment of regional apparatus such as regional offices, specifically the Semarang City Office of Women's Empowerment and Child Protection. The purpose of this thesis is to find out the forms of protection for women victims of sexual violence implemented by the Semarang City Office of Women's Empowerment and Child Protection, as well as the obstacles of the Semarang City Office of Women's Empowerment and Child Protection in providing forms of sexual violence against women in Semarang City.

This thesis uses a normative juridical approach method by examining library materials or secondary data as a basis for research. The research specification used is descriptive analysis to describe a problem at a certain time. Data collection methods are carried out by literature study and guided free interviews as support. Then, the data analysis method used is qualitative data in the form of verbal words.

The results of the study show that the Semarang City Office of Women's Empowerment and Child Protection implements five services to protect women from sexual violence. The five services include complaint services, visum facilitation, legal aid assistance, rehabilitation, repatriation and social reintegration. In its implementation, there are also several obstacles in each of the services provided by the Semarang City Office of Women's Empowerment and Child Protection.

Therefore, it can be concluded that the Semarang City Office of Women's Empowerment and Child Protection is implementing five services as a form of protection for women victims of sexual violence in carrying out its duties in accordance with Semarang Mayor Regulation No. 101 of 2021, although there are still some obstacles. Solutions are needed to overcome the obstacles that exist in the Semarang City Office of Women's Empowerment and Child Protection in providing forms of protection for women victims of sexual violence.

Keywords: *Semarang City Office of Women's Empowerment and Child Protection; Sexual Violence Against Women; Local Government.*